



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 100.4.1 – 215 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.4.1 – 062 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan usulan pengajuan Rancangan Peraturan Bupati dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan RSUD Tora Belo, maka Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 124).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sigi Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.4.1 – 062 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Sigi Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Juni 2025


BUPATI SIGI,
MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sigi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

DAFTAR PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perkada	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Penilaian PBB-P2 2. Penghitungan penilaian PBB-P2	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 7 ayat (7) Perda Nomor 11 Tahun 2023
2.	Perkada	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	1. Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa; 3. Penggunaan penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Pelaporan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 6. Pembinaan dan pengawasan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 97 ayat (3) Perda Nomor 11 Tahun 2023

3.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Besaran persentase PBB-P2; 2. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial; 3. Fasilitas Pendidikan dalam pajak air tanah; 4. Besarnya nilai perolehan air tanah; 5. Masa pajak dan tahun pajak; 6. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak dan retribusi; 7. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi; dan 8. Tata cara pengenaan sanksi administratif.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 124 ayat (6)Perda Nomor. 11 Tahun 2023
4.	Perkada	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 120 ayat (6) Perda No. 11 ahun 2023
5.	Perkada	Tata Cara Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prosedur Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	1. Dokumen Andalalin; 2. Mekanisme persetujuan Andalalin; 3. Pengawasan hasil Andalalin; dan 4. Pengawasan, penilaian dan implementasi Andalalin.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas		√	- Dinas Perhubungan - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2021
6.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1. Tata cara pemberian sanksi administratif; 2. Bentuk dan petugas penanganan serta tata cara Rehabilitasi; 3. Tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan 4. pemberian penghargaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		√	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Satpol PP - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 11 ayat (7), Pasal 12 ayat (7), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2023

7.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol	1. Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk Perusahaan; 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pengecer; dan 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk perseorangan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol		√	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TW 1	Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (3) Perda Nomor 9 Tahun 2023
8.	Perkada	Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Puskesmas	1. Pembentukan dan Kedudukan 2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Tata Kerja 5. Kepegawaian dan Jabatan	√		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat		√	- Dinas Kesehatan - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024
9.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Dokumen SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kab. Sigi	1. Penambahan SOP Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di RSUD Torabelo; dan 2. Penambahan SOP Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Puskesmas		√	PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah		√	- Dinas Kesehatan - RSUD Torabelo - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 1 PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012
10.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena	1. Besaran Program bidang pendidikan 2. Besaran biaya Program bidang kesehatan 3. Bentuk dan tata cara pelaksanaan Program bidang Perlindungan Sosial 4. Persyaratan penerima manfaat Program Bidang Pendidikan 5. Persyaratan penerima manfaat Program bidang kesehatan 6. Persyaratan Penerima manfaat Program Bidang Perlindungan Sosial 7. Mekanisme pelaksanaan Program	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena		√	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian Kesra - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (7), Pasal 13, Pasal 18 ayat (4), Pasal, Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 28, Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (4)

			8. Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat 9. Tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha 10. Pemberian penghargaan 11. Tata cara monitoring dan evaluasi						-		
11.	Perkada	Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	1. Kewajiban 2. Larangan 3. Pembentukan majelis pertimbangan kode etik 4. Prosedur penegakan kode etik	√		1. Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2018
12.	Perkada	Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah	1. Kewenangan pembukaan dan pengelolaan rekening 2. Pengoperasian Rekening 3. Pelaporan dan Pengendalian Saldo Rekening 4. Blokir dan penutupan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah		√	- BKAD - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 19 PP 39 Tahun 2007

13.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Tata Cara pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa 2. Kriteria bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi 3. Kriteria wilayah daerah dengan bidang dan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya 4. Besaran biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro 5. Tata cara pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro 6. tata cara pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan 7. Tata cara pelaksanaan pola kemitraan 8. Tata cara pelaksanaan pembiayaan 9. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Inkubasi	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro		√	- Dinas Koperasi, UKM - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023
14.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi	1. Perubahan Pasal 5 2. Perubahan Pasal 6 3. Perubahan Pasal 7 4. Perubahan Pasal 8 5. Perubahan Pasal 9 6. Perubahan Pasal 12 7. Perubahan Pasal 16 8. Perubahan Pasal 18 9. Perubahan Pasal 20		√	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008

15.	Perkada	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi	1. Remunerasi 2. Fasilitas dan Asuransi 3. Penghentian Pemberian Remunerasi 4. Monitoring dan Evaluasi	√		Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
16.	Perkada	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo	1. Tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa 2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa 3. Pengawasan dan pembinaan	√		Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 77 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
17.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo	1. Perubahan Pasal 47 Investasi 2. Perubahan Pasal 50 Kerja Sama 3. Perubahan Pasal 51 Silpa 4. Perubahan Pasal 39 Pengelolaan Piutang dan Utang		√	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 2	
18.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital Bylaws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi	1. Perubahan Pasal 5 Visi dan Misi 2. Perubahan Pasal 8 Kedudukan dan Keanggotaan		√	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
19.	Perkada	Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo	1. Kebijakan akuntansi 2. Lampiran Kebijakan akuntansi BLUD	√		Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 99 ayat (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

20.	Perkada	Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo	1. Pengadaan 2. Persyaratan 3. Pengangkatan 4. Penempatan 5. Batas usia 6. Masa kerja 7. Hak dan kewajiban 8. Pendanaan	√		Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 4 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
21.	Perkada	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	1. Tata Nilai Pengadaan 2. Ruang Lingkup Pengadaan 3. Para Pihak 4. Perencanaan Pengadaan 5. Persiapan Pengadaan 6. Pelaksanaan Pengadaan 7. Pembayaran Prestasi Kerja 8. Keadaan Kahar 9. Pemutusan Surat Perjanjian 10. Sanksi 11. Penyelesaian Perselisihan 12. Pelaporan dan Serah Terima 13. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik	√		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa		√	- Dinas PMD - Inspektorat - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 52 ayat (6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
22.	Perkada	Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025-2029	1. Arsitektur SPBE 2. Reviu Arsitektur SPBE 3. Referensi Arsitektur SPBE 4. Domain Arsitektur SPBE 5. Penerapan Arsitektur SPBE 6. Sistematika Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah	√		1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Noor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem		√	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

						Pemerintahan Berbasis Elektronik					
23.	Perkada	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2033	1. Visi Misi 2. Arah Kebijakan Penanaman Modal 3. Peta Panduan Implementasi RUPM 4. Pelaksanaan RUPM	√		Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal		√	- DPMPTSP - Bapperida - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 4 Perpres Nomor 26 Tahun 2012
24.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1. Tata cara pemberian sanksi administratif 2. Struktur organisasi Satlinmas di Desa 3. Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS 4. Kode Etik PPNS 5. Tata cara pemberian sanksi administratif 6. Bentuk dan tata cara pembinaan 7. Tata cara penilaian,kriteria, dan besaran penghargaan 8. Tata cara penilaian,kriteria, dan kriteria penghargaan 9. Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat 10. Bentuk dan tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan	√		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		√	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 50, Pasal 56 ayat (4), Pasal 81 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (4), Pasal 104 ayat (4), Pasal 105 ayat (5), Pasal 106 ayat (4), Pasal 113, Pasal 114 ayat (3),
25.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sigi Religi	1. Tata cara pemasyarakatan kegiatan Program 2. Bentuk Program 3. Persyaratan Lembaga Keagamaan 4. Persyaratan lembaga rumah ibadah 5. Persyaratan pengurus rumah ibadah 6. Persyaratan lembaga keagamaan lainnya 7. Persyaratan Imam Masjid, Pegawai Syara/dewan majelis Masjid, Pendeta/Pastor/Opsir	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sigi Religi		√	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian Kesra - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 3 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat

			dan Pemuka agama lainnya selain agama islam dan agama Kristen 8. Mekanisme pelaksanaan Program 9. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat 10. Tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha 11. Tata cara monitoring dan evaluasi								(3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (4)
26.	Perkada	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Pakaian Dinas ASN 2. Atribut & Kelengkapan Pakaian Dinas 3. Pembinaan dan Pengawasan	√		PMDN Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah		√	- Bagian Organisasi Setda Sigi - Bagian Hukum Setda Sigi	TW 2	
27.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Formal	Perubahan Nomenklatur UPT Satuan Pendidikan Formal		√	1. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Perbup No. 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Formal		√	- Dinas Pendidikan & Kebudayaan - Bagian Organisasi Setda Sigi - Bagian Hukum Setda Sigi	TW 2	
28.	Perkada	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi	1. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi 2. Kerja sama 3. Sosialisasi dan publikasi 4. Peran Pemerintah Daerah 5. Penghargaan 6. Pembiayaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	√		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 2	

29.	Perkada	Pedoman Audit Investigasi	1. Maksud dan tujuan 2. Ruang lingkup 3. Pembiayaan 4. Lampiran pedoman umum dan pedoman teknis audit investigasi	√		PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 50 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008
30.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025	Perubahan besaran Pagu ADD		√	PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		√	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bagian Hukum	TW 2	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025
31.	Perkada	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan	1. Pembentukan UPT PLUT		√	1. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah		√	- Dinas Koperasi, UKM - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

32.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat	Perubahan struktur organisasi Inspektorat		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	
33.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah	1. Perubahan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup 2. Perubahan struktur organisasi Dinas Komunikasi & Informatika		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kominfo 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Hukum	TW 3	
34.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah	1. Perubahan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah 2.		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Bagian Organisasi 3. Bagian Hukum	TW 3	
35.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat	1. Perubahan Susunan Organisasi 2. Perubahan Tugas dan Fungsi		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	

36.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	1.Perubahan Susunan Organisasi 2.Perubahan Tugas dan Fungsi		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. DLH 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	
37.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	1.Perubahan Susunan Organisasi 2.Perubahan Tugas dan Fungsi		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Bapenda 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	
38.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1.Perubahan Susunan Organisasi 2.Perubahan Tugas dan Fungsi		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	
39.	Perkada	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Sigi	11. Perubahan Lampiran I s/d Lampiran V		√	PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah		√	- Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 6 ayat (1) huruf a PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013
40.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1. Perencanaan pelindungan dan pemberdayaan petani 2. Asuransi pertanian 3. Pengelolaan pasar modern 4. Pemberian kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian bagi petani 5. Regenerasi petani.	√		1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		√	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 7, Pasal 25, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 47 Perda Nomor 2 Tahun 2023

41.	Perkada	Pedoman Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan	1. Penanganan pelaporan pengaduan 2. Pelindungan dan penghargaan Pelapor	√		Permen RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 3	Lampiran BAB II Permen RB Nomor 52 Tahun 2014
42.	Perkada	Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Tata Cara Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026	1. Pengalokasian ADD 2. Penyaluran ADD 3. Penggunaan ADD 4. Tata Cara Perhitungan Rincian ADD 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 6. Pengelolaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Pelaporan 8. Pembinaan dan Pengawasan	√		PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		√	- DPMD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019
43.	Perkada	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa 2. Prinsip penyusunan APB Desa 3. Kebijakan penyusunan APB Desa 4. Teknis penyusunan APB Desa 5. Hal khusus lainnya.	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa		√	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

44.	Perkada	Grand Design Pembangunan Kependudukan	1. Arah Kebijakan dan Tujuan 2. Pelaksanaan GDPK 3. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK 4. Pendanaan	√		Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan		√	- Dinas Pengend Pend. & KB - Bapperida - Dinas Pendidikan - Dinkes - Dinas Kepend. dan Capil - DP3A - Dinas Sosial - Disnakertrans - Dinas Kominfo - BKAD - Bag. Hukum	TW3	Pasal 10 Perpres 153 Tahun 2014
45.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1. Tata cara pelaksanaan kewajiban 2. Tata cara pemberian fasilitas 3. Tata cara pemberian sanksi administratif 4. Standar sarana dan prasarana pelayanan keagamaan 5. Tata cara pelaksanaan kewajiban 6. Pemberian advokasi sosial 7. Standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas 8. Besar dan jenis Konsesi 9. Pemberdayaan 10. Pemberian Insentif 11. Tata cara pemberian penghargaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		√	- Dinas Sosial - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 47 ayat (3), Pasal 71 ayat (6), Pasal 78 ayat (4), Pasal 83 ayat (4)
46.	Perkada	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas	1. Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah 2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah 3. Jangka waktu 4. Partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		√	- Dinas Sosial - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 10 Perda Nomor 5 Tahun 2024

47.	Perkada	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		√	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
48.	Perkada	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,		√	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004

						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.					
49.	Perkada	Tarif Air Minum pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	1. Prinsip dan tujuan 2. Blok konsumsi 3. Kelompok pelanggan 4. Jenis dan ketentuan tarif 5. Tarif 6. Pembayaran rekening 7. Penutupan sambungan 8. Pelanggaran dan sanksi	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum		√	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 25 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2016
50.	Perkada	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	5. Pola Tata Kelola 6. Rencana Strategis 7. Standar Pelayanan Minimal	√		Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- Dinas Kesehatan - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
51.	Perkada	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 - 2029	1. Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan 2. Perencanaan dan penganggaran 3. Mekanisme evaluasi terhadap RAD pelayanan kepemudaan 4. Perencanaan dan penganggaran	√		Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan		√	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 9 ayat (3) Perpres Nomor 43 Tahun 2022
52.	Perkada	Desain Olahraga Daerah	1. Penyelenggaraan 2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 3. Pendanaan 4. Perubahan DOD	√		Permenpora Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah		√	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 19 ayat (1) Permenpora Nomor

53.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran	1. Pelindungan administratif 2. Pengawasan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran		√	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 4 ayat (9) dan Pasal 32 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2022
54.	Perkada	Tata Cara Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran	1. Pembentukan LTSA 2. Tugas dan fungsi 3. Organisasi 4. Tata kerja 5. pembiayaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran		√	- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 25 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2022
55.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyalahgunaan Obat dan Inhalan	1. Jenis obat berdasarkan penggolongan obat 2. Jenis Inhalan 3. Upaya pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan pada satuan pendidikan 4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan pada tempat usaha	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyalahgunaan Obat dan Inhalan		√	- Dinas Kesehatan - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14, Pasal 17 Perda Nomor 2 Tahun 2022
56	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung	1. Tata cara pengenaan sanksi administratif 2. Tata cara pemeriksaan dokumen 3. Tata cara pendaftaran ulang PBG 4. Tata cara penetapan nilai dan pembayaran Retribusi Daerah 5. Bentuk dan tata cara peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung		√	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 16, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 68, Pasal 72, Perda Nomor 9 Tahun 2022

			6. Tata cara pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
57.	Perkada	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	1. Sistematika 2. Pembinaan pelaksanaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung		√	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 39 Perda Nomor 9 Tahun 2022
58.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani 2. Asuransi pertanian 3. Pengelolaan pasar modern 4. Pemberian kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian bagi petani 5. Regenerasi petani	√		Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		√	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 7 ayat (3), Pasal 25, Pasal 37 ayat (2), Pasal 42 ayat (4), Pasal 47 ayat (4) Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaa n Petani
59.	Perkada	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi	1. Pemberian subsidi 2. Mekanisme subsidi 3. Verifikasi 4. Anggaran 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan 6. Monitoring dan Evaluasi	√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangg Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		√	- Badan Keuangan dan Aset Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 46 ayat (6) Perda Nomor 6 Tahun 2021

60.	Perkada	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan	1. Belanja bantuan keuangan 2. Perencanaan dan penganggaran 3. Pelaksanaan penatausahaan 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban 5. Monitoring dan evaluasi	√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		√	- Badan Keuangan dan Aset Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 54 ayat (8) Perda Nomor 6 Tahun 2021
61.	Perkada	Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah	1. Strategi pengendalian kecurangan 2. Lingkungan pengendalian kecurangan 3. Perilaku anti kecurangan 4. Satuan tugas pengendalian kecurangan 5. Pembinaan dan pengawasan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 3	
62.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025	Perubahan besaran Pagu DBH		√	PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		√	- Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019

63.	Perkada	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	1. Penyelenggaraan (enugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 2. Hak dan Kewajiban 3. Pembinaan dan Pengawasan 4. Sanksi	√		Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan		√	- Dinas Kesehatan - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
64.	Perkada	Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih	1. kewenangan Pemerintah Daerah 2. Pemberdayaan Koperasi 3. Pembentukan satuan tugas 4. Pelindungan Koperasi 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan 6. pembinaan dan pengawasan 7. pendanaan.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		√	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas PMD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
65.	Perkada	Sewa Kendaraan Dinas untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Objek sewa 2. Klasifikasi dan kapasitas isi Slinder Kendaraan Sewa 3. Perencanaan Sewa Kendaraan 4. Kebutuhan dan pemanfaatan 5. Tata cara dan spesifikasi penyewaan 6. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi	√		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025		√	- BKAD - Bagian Hukum	TW 3	Lampiran Permenkeu Nomor 39 Tahun 2024
66.	Perkada	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Kewajiban dan larangan 2. Jenis pelanggaran dan hukuman 3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin 4. Tata cara pemeriksaan, penjatuhan hukuman dan penyampaian keputusan 5. Berlakunya hukuman disiplin 6. Upaya administratif.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		√	- BKPSDMD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

67.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial	Penambahan pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil		√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		√	- BKAD - Bagian Hukum	TW 3	Lampiran Bab II Huruf D Angka 2 Huruf e Angka 9) dan Huruf f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
-----	---------	--	--	--	---	---	--	---	---	------	---



BURATI SIGI,



MOHAMAD RIZAL INTJENAE